

Generasi muda mendominasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, termasuk di Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan komposisi pemilih muda beragam dan forum diskusi politik yang luas. Kelompok ini memiliki karakter politik yang unik, seperti idealis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap pemimpin, tetapi juga rentan terhadap konsumsi informasi politik dangkal dan misinformasi. Kondisi tersebut menuntut pendidikan pemilih agar partisipasi mereka tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berlandaskan kesadaran dan penilaian kritis. Meski KPU memiliki mandat melakukan pendidikan pemilih dan sudah dilakukan, tetapi kajian yang ada menunjukkan bahwa fokusnya hanya ke peningkatan angka partisipasi, belum ke substansi. Padahal, dalam demokrasi, partisipasi tidak hanya menuntut kehadiran pemilih, tetapi juga kesadaran dan penilaian kritis. Hal ini membuat praktik pendidikan pemilih oleh KPU Kota Yogyakarta menjadi menarik dan relevan diteliti.

Penelitian ini mengkaji program pendidikan pemilih bagi generasi muda oleh KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu 2024 dalam perspektif sosialisasi politik. Fokus analisis diarahkan pada kualitas materi dan metode program pendidikan pemilih sebagai cerminan orientasi program. Analisis materi menggunakan kerangka orientasi politik kognitif, afektif, dan evaluatif oleh Almond dan Verba, sementara analisis metode menggunakan prinsip dialogis oleh Paulo Freire dan *experiential learning* oleh John Dewey. Kerangka tersebut digunakan sebagai instrumen menilai sejauh mana program berpotensi membentuk orientasi partisipatif.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa program pendidikan pemilih KPU Kota Yogyakarta lebih berorientasi pada penguatan kepatuhan elektoral daripada membentuk orientasi politik partisipatif. Materi pendidikan pemilih masih didominasi muatan kognitif yang menekankan pemahaman prosedural pemilu, sementara materi afektif dan evaluatif terbatas. Metode pendidikan pemilih yang digunakan pun belum mengintegrasikan ruang refleksi sebagai inti proses pembelajaran. Temuan juga menemukan bahwa karakter program tidak terlepas dari struktur tata kelola kelembagaan KPU Kota Yogyakarta.

Kata kunci: sosialisasi politik, pendidikan pemilih, KPU Kota Yogyakarta, generasi muda, Pemilu 2024

Young people dominate the Final Voter List (*Daftar Pemilih Tetap/DPT*) of the 2024 General Election, including in the City of Yogyakarta, a student city with a diverse composition of young voters and a broad forum for political discussion. This group is characterized by idealism and high expectations toward leaders, yet remains vulnerable to superficial political information and misinformation—conditions that demand voter education grounded not merely in procedural participation, but in awareness and critical judgment. Although the General Elections Commission (KPU) holds a mandate to conduct voter education and has done so, existing studies indicate that its focus has been limited to increasing participation rates, without addressing the substantive quality of participation. Yet, in a democracy, participation requires not only voter turnout, but also awareness and critical judgement. This makes the voter education practices of KPU Kota Yogyakarta a compelling and relevant subject of study.

This study examines the voter education program for young people conducted by KPU Kota Yogyakarta during the 2024 General Election through the lens of political socialization. The analytical focus is directed at the quality of the content and methods of the voter education program as a reflection of its programmatic orientation. Content analysis employs the cognitive, affective, and evaluative political orientation framework by Almond and Verba, while method analysis draws on the dialogic principles of Paulo Freire and the experiential learning theory of John Dewey as instruments for assessing the extent to which the program design has the potential to foster participatory orientations.

Using a qualitative approach and case study method, this study finds that KPU Kota Yogyakarta's voter education program is more oriented toward reinforcing electoral compliance than toward cultivating participatory political orientations. The voter education content remains dominated by cognitive elements that emphasize procedural understanding of elections, while affective and evaluative content are limited. The methods employed also fail to integrate spaces for reflection as a core component of the learning process. The findings further reveal that the character of the program is inseparable from the institutional governance structure of KPU Kota Yogyakarta.

Keywords: political socialization, voter education, KPU Kota Yogyakarta, young people, 2024 General Election.